

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun produktivitas pertanian masih jauh dari harapan. Salah satu faktor penyebab kurangnya produktivitas pertanian adalah sumber daya manusia yang masih rendah dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya. Mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan sistem manual dalam pengolahan lahan pertanian. Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi (Sukirno, Sadono; 2007).

Pembangunan memiliki arti yang luas sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional maupun lokal, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan (Todaro, 2000). Pembangunan memiliki tujuan yang diidentikkan dengan industrialisasi dan pariwisata sehingga kurang memperhatikan aspek pemerataan. Penyebab utama stagnan pertumbuhan

di beberapa negara berpendapatan menengah adalah transformasi pertanian tidak memadai. Ketika sebuah negara mencoba untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, cenderung memprioritaskan pembangunan industri lebih dari pembangunan pertanian (Jeon, 2013). Pembangunan yang tercapai secara makro tampak berhasil namun di sisi lain menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan.

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor penggerak pertumbuhan perekonomian suatu negara, karena sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja yang besar, selain itu sektor pertanian juga berperan sebagai penyedia bahan baku bagi kebutuhan sandang masyarakat maupun sebagai bahan baku sektor sekunder. Sektor pertanian, memiliki nilai multifungsi yang besar dalam peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keberlanjutan pertanian dengan program lahan pertanian abadi akan dapat diwujudkan jika sektor pertanian dengan nilai multifungsinya dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan, karena sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan akan tetap penting meskipun kontribusinya menurun terhadap perekonomian nasional.

Negara agraris seperti Indonesia, kebijakan yang diambil pemerintah perlu mempertimbangkan fungsi pertanian dalam struktur insentif sektor pertanian. Komitmen dukungan insentif melalui pemahaman peran ganda sektor pertanian perlu didefinisikan secara luas, bukan saja insentif ekonomi seperti subsidi dan proteksi, tetapi dukungan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam arti luas. Pengembangan lahan pertanian dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia dan segala

upaya yang telah dilakukan oleh Negara tersebut untuk menguranginya. Jika dilihat dari faktor penyebab kemiskinan, dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu, kemiskinan struktural, kultural dan alamiah. Salah satu cara yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di wilayah pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai petani adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian sehingga peran penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terletak dalam beberapa hal yaitu, penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja nasional, penyedia kebutuhan pangan masyarakat atau penduduk suatu Negara, penghasil devisa, pendorong tumbuhnya sector industri, dan pengetasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat tercapai.

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang perekonomiannya daerahnya selain masih bergantung pada sektor pariwisata namun Provinsi Bali juga masih tergantung pada sektor pertanian. Pertanian berada di posisi ke dua setelah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, berarti provinsi Bali masih tergantung pada sektor pertanian. Penduduk miskin yang tersebar di seluruh kota maupun desa di wilayah Provinsi Bali. Secara umum penduduk miskin berada pada wilayah pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Kemiskinan di pedesaan merupakan masalah yang memerlukan penanganan secara terkoordinasi baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat. Permasalahan utama yang dihadapi penduduk pedesaan adalah kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengakses permodalan, pengelolaan usaha dan pemasaran hasil, sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada

menjadi terbatas. Kriteria yang paling mendekati mengenai penduduk miskin adalah bahwa pada umumnya mereka yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok di bidang pertanian dan kegiatan lain-lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional. Penduduk miskin masih menggantungkan kehidupan mereka dari pola pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani yang berpenghasilan rendah.

Mengatasi permasalahan kemiskinan pada penduduk yang bekerja pada sektor pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah melakukan pengembangan pembangunan pertanian di Bali seperti program Prima Tani dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal dengan inovasi diharapkan mampu menumbuhkan usaha tani produktif, tidak meninggalkan kearifan lokal serta tidak melakukan eksploitasi yang dapat menguras keberadaan sumber daya yang ada. Adopsi model Prima Tani ini juga ditindak lanjuti dengan nota kesepahaman antara Badan LitBang Pertanian dengan Pemda Bali No:075/12/KB/B PEM/2009 dan No:680/HM.240/1.10/09 pada tanggal 28 Oktober 2009 dengan tindak lanjut pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Bali Mandara secara berkelanjutan yaitu upaya terobosan dalam mempercepat adopsi teknologi pertanian kepada masyarakat pedesaan, untuk meningkatkan dukungan Pemda Tingkat II ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman antara Gubernur dengan Bupati, sehingga dalam pembangunan pertanian diharapkan dapat bersinergi. Program tersebut memprioritaskan SIMANTRI untuk menuju pertanian secara berkelanjutan. SIMANTRI tersebut diawali dengan pertanian terintegrasi yang menyasar tempat-tempat potensial dan komoditi unggulan dalam hal ini di Kecamatan Nusa Penida ditunjuk sebagai daerah pengembangan bibit

sapi Bali menurut Keputusan Menteri Pertanian dengan no 348 tahun 2016. Selama ini hasil dari limbah ternak belum dimanfaatkan secara maksimal, dengan adanya SIMANTRI yang bertujuan mendorong pertanian terintegrasi, petani telah mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah melalui pengolahan serta mampu mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Indikator keberhasilan dari Program SIMANTRI yaitu terciptanya usahatani produktif, terciptanya lapangan kerja melalui pengembangan diversifikasi, berkembangnya lembaga usaha ekonomi perdesaan yang bermuara pada peningkatan pendapatan petani. Sejalan dengan hal tersebut. Sistem pertanian terintegrasi merupakan sistem pertanian dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya lokal yang ada dengan orientasi pada kegiatan usahatani bebas limbah. Pada pelaksanaannya diharapkan mampu menumbuhkan integrasi horizontal dan vertikal yang diharapkan memberikan keuntungan antara lain peningkatan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah pada produk usahatani yang akhirnya mampu memberikan peningkatan pendapatan petani.

Dalam Program SIMANTRI Bali Mandara mempunyai beberapa kriteria yang digunakan dalam memberikan Program SIMANTRI yang pertama, desa yang memiliki potensi pertanian dan memiliki komoditi unggulan sebagai titik unkit, kedua, terdapat GAPOKTAN yang memiliki kemauan dan mampu melaksanakan kegiatan terintegrasi, dan yang ketiga, dapat dilaksanakan pada desa dengan rumah tangga miskin yang memiliki sumber daya manusia dan potensi untuk pengembangan agribisnis. Adanya hal tersebut, sehingga rumah

tangga petani miskin yang ada di Kecamatan Klungkung menjadi sasaran utama dari Program SIMANTRI.

Program Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI) yang dilaksanakan pada tahun 2009, yang merupakan program utama Gubernur Bali di dalam mengatasi masalah daerah terutama masalah kemiskinan yang bertujuan menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Sistem penganggaran SIMANTRI menggunakan pola Bansos sesuai proposal, RAB, dan Rencana Usaha Kelompok (RUK), yang sasarannya adalah GAPOKTAN dalam satu desa dengan satu kelompok inti sebagai pengelola ternak dengan fasilitasnya dalam program SIMANTRI. Gabungan Kelompok Tani yang disingkat GAPOKTAN adalah kumpulan petani atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Jumlah anggota GAPOKTAN terdiri 5 sampai 20 orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya.

Program Bantuan Pemerintah dikatakan berhasil apabila program dapat menunjukkan efektivitas yang baik. Hal tersebut ditandai dengan *output* yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan atau ditargetkan terutama dalam meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah hasil perikanan. Menurut (Halim.dkk.,2017) “efektivitas adalah ukuran keberhasilan tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif”. Efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan yang dikaitkan dengan outputnya. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*)

dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin berperan kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif program tersebut (Halim dan Syam, 2013). Dalam setiap program, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas program dapat dinilai dengan menggunakan model evaluasi. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Arikunto dan Cepi (2014) yang menyatakan bahwa tujuan umum dari evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa efektif program yang di jalankan. Model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program adalah evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Dan dengan menggunakan rasio efektivitas yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasi dalam merealisasikan program Bantuan Pemerintah. Melalui empat komponen tersebut dapat mengukur sejauhmana efektivitas program agar berjalan efektif agar menghasilkan suatu *output* yang baik.

Dari masalah diatas dapat di ambil judul “Efektivitas Program Simantri Pada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kecamatan Klungkung”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas program Simantri pada GAPOKTAN ditinjau dari segi *context*?

2. Bagaimana efektivitas program Simantri pada GAPOKTAN ditinjau dari segi *input*?
3. Bagaimana efektivitas program Simantri pada GAPOKTAN ditinjau dari segi *process*?
4. Bagaimana efektivitas program Simantri pada GAPOKTAN ditinjau dari segi *product*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Efektivitas program Simantri pada GAPOKTAN ditinjau dari segi *context*.
2. Efektivitas program Simantri pada GAPOKTAN ditinjau dari segi *input*.
3. Efektivitas program Simantri pada GAPOKTAN ditinjau dari segi *process*.
4. Efektivitas program Simantri pada GAPOKTAN ditinjau dari segi *product*.

### 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penulisan ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam bidang Manajemen Keuangan/Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan khususnya di bidang ekonomi dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya Program Bantuan Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok Simantri Kecamatan Klungkung.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumber pemikiran bagi pihak pemerintah dalam mengeluarkan peraturan dan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, serta dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

4) Bagi Lembaga Undiksha

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan menjadi sumber informasi yang kompeten bagi penelitian selanjutnya

